

KAJIAN LITERATUR IMPLEMENTASI PEDOMAN AKUNTANSI PESANTREN (PAP)

Fuad Yanuar

Akuntansi/STAI Alhusain

fyarc86@gmail.com

Abstraksi – Penelitian ini bertujuan membantu menyampaikan Pedoman Akuntansi Pesantren (PAP) yang dikeluarkan IAI dan BI sebagai suatu keberpihakan kedua lembaga itu terhadap perkembangan ekonomi pesantren dan untuk penyusunan laporan keuangan pesantren yang sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku di Indonesia. Dalam penelitian ini dibahas tentang pos-pos akuntansi yang mungkin bisa digunakan dalam penyajian laporan keuangan pesantren berdasarkan Pedoman Akuntansi Pesantren dengan bahasa yang sederhana agar bisa bermanfaat bagi lingkungan pesantren dan tidak keluar dari PSAK No.45.

Kata Kunci : Pedoman Akuntansi Pesantren, PSAK No.45, Pesantren, Laporan keuangan

Pendahuluan

Sejalan perkembangan masyarakat maka diikuti pula perkembangan dari segala lini organisasi, tidak terkecuali perkembangan organisasi nirlaba. Yaitu organisasi yang bertujuan tidak mencari laba. Pada umumnya organisasi tersebut operasinya menekankan pada kegiatan pelayanan kepada pihak eksternal, misalnya organisasi pelayanan pendidikan, organisasi kesehatan, keagamaan, dan sosial. Organisasi nirlaba dibagi menjadi dua kelompok besar, yaitu organisasi nirlaba pemerintahan dan organisasi nirlaba nonpemerintahan

Praktik akuntansi pada lembaga-lembaga keagamaan dan lembaga nirlaba masih dianggap tidak lazim. Akan tetapi sejalan dengan perkembangan tata kelola organisasi menuju *good governance* maka sudah menjadi keharusan untuk menerapkan kebijakan akuntansi terhadap organisasi keagamaan maupun organisasi nirlaba lain untuk meningkatkan tingkat kepercayaan publik. Meskipun belum lazim untuk menerapkan praktek akuntansi pada lembaga yang bergerak dibidang keagamaan dan pendidikan seperti pesantren, akan tetapi penelitian banyak dilakukan untuk kajian akuntansi.

Tidak hanya sebagai lembaga keagamaan yang memiliki tingkat pendidikan dari bawah sampai perguruan tinggi, seiring perkembangan pesantren juga telah memiliki beragam jenis usaha. Karena itu sudah menjadi urgentsitas untuk menerapkan praktik akuntansi agar pencatatan keuangan pesantren sesuai dengan standar agar lebih transparan dan dapat dipertanggungjawabkan. Kegiatan bisnis yang juga dijalankan di pesantren akan terus berkembang sehingga memberi manfaat kepada pesantren dan khalayak umum.

Peraturan kemenkeu No. 3 tahun 1979 membagi pesantren menjadi empat klasifikasi yaitu :

1. Pesantren tipe A yaitu para santri tinggal di asrama dan pengajaran masih secara tradisional.
2. Pesantren tipe B yaitu para santri tinggal di asrama dan pengajaran dengan metode klasikal.
3. Pesantren tipe C yaitu para santri tinggal diasrama akan tetapi para santri belajar diluar pesantren untuk sekolah umum, dan belajar mengaji di asrama.

4. Pesantren tipe D yaitu para santri tinggal diasrama dan belajar pendidikan umum maupun keagamaan dilingkungan pesantren.

Pesantren merupakan organisasi nirlaba yaitu organisasi yang memperoleh modal sendiri atau *fund capital* dengan cara meningkatkan surplus, menerima sumbangan atau bantuan donasi individu atau kelompok masyarakat. Tujuan organisasi nirlaba meningkatkan pelayanan kepada masyarakat bukan memakmurkan pemegang saham (Sartono, 2000). Organisasi nirlaba perlu memperhatikan laporan keuangannya karena digunakan untuk menilai kemampuan organisasi dalam memberikan jasanya, kemampuan untuk terus memberikan jasanya dan cara organisasi melaksanakan tanggung jawab terhadap kinerjanya. Apalagi prinsip produk utama dari organisasi nirlaba adalah barang *public* yang sulit diukur kinerjanya (Prabowo, 2004). Melihat potensi berkembangnya pesantren sebagai organisasi nirlaba maka laporan keuangan akan menjadi sangat krusial. Maka IAI dan Bank Indonesia menerbitkan Pedoman Akuntansi Pesantren sebagai keberpihakan IAI dan BI akan pemberdayaan ekonomi Pondok Pesantren agar mampu menyusun laporan keuangan sesuai dengan standar akuntansi keuangan yang berlaku umum di Indonesia.

Dalam pedoman ini, pesantren tetap diposisikan sebagai lembaga nirlaba. Pesantren yang memiliki lembaga usaha yang berbadan hukum, pencatatan dan pelaporan keuangannya mengikuti standar yang ada. Pencatatan dan pelaporan keuangan pesantren tidak serumit perusahaan *go public*, tapi lebih kompleks dibandingkan akuntansi usaha mikro dan kecil.

Dengan demikian penelitian ini sebagai kajian literatur mencoba untuk menyederhanakan bahasa akuntansi dan mencoba meringkas pedoman yang diterbitkan IAI dan BI dengan bahasa yang lebih sederhana untuk khalayak umum dan yang paling utama kepada pengampu pesantren agar bisa memahami pedoman akuntansi pesantren dengan harapan pesantren bisa membuat laporan keuangan sesuai standar akuntansi yang berlaku di Indonesia yaitu Penyajian atas laporan keuangan Pondok pesantren yang diatur dalam PAP mengaju pada PSAK 45. Pelaporan Keuangan Entitas Nirlaba. Pedoman Akuntansi Pesantren mengatur laporan keuangan lengkap yang harus disusun oleh Pondok Pesantren . Dan pada akhirnya meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pesantren tersebut, baik dalam membina santri, mengelola sumbangan, dan asetnya. Diharapkan dengan adanya penelitian telaah literature ini pesantren terbantu untuk menyajikan laporan keuangan sesuai pedoman

akuntansi pesantren yang dikeluarkan IAI dan BI serta PSAK 45 dengan setidaknya menyajikan laporan :

1. Laporan posisi keuangan (neraca) pada akhir periode
2. Laporan aktivitas untuk satu periode
3. Laporan arus kas untuk satu periode, dan
4. Catatan atas laporan keuangan.

METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif, yaitu **Menurut Bogdan dan Taylor (1975)** yang dikutip oleh Moleong (2007:4) mengemukakan bahwa metodologi kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati. Penelitian kualitatif bertujuan memperoleh gambaran seutuhnya mengenai suatu hal menurut pandangan manusia yang diteliti. Penelitian kualitatif berhubungan dengan ide, persepsi, pendapat atau kepercayaan orang yang diteliti dan kesemuanya tidak dapat diukur dengan angka.

Studi yang dilakukan dalam penelitian ini merupakan penelitian kualitatif yang lebih menitikberatkan pembahasan telaah literature. Telaah literature merupakan studi tentang penguraian teori, penelitian, bahan kajian pustaka. Dalam penelitian ini menggunakan kajian riset kepustakaan (*literature research*) yaitu menggunakan literatur yang akan dibahas dalam penelitian ini dan menjelaskan dengan jelas literature yang digunakan. Studi kepustakaan pada penelitian dengan cara mempelajari pedoman akuntansi pesantren yang dikeluarkan IAI dan BI tentang tata cara penyusunan laporan keuangan pesantren yang berpijak kepada PSAK 45 tentang pelaporan keuangan organisasi nirlaba dan buku – buku literature yang berkaitan dengan akuntansi keuangan organisasi nirlaba terutama pesantren. Dan penelitian ini menjabarkan serta menjelaskan pedoman akuntansi pesantren serta PSAK 45 dengan bahasa yang sederhana tanpa mengurangi isi maupun pedoman tersebut, dengan tujuan agar penelitian ini bermanfaat bagi para pengguna terutama lingkungan pesantren untuk menyajikan laporan keuangan sesuai standar akuntansi yang berlaku di Indonesia.

PEMBAHASAN

Pedoman Akuntansi Pesantren yang diterbitkan Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) dan Bank Indonesia (BI) merupakan salah satu contoh keberpihakan instansi yang konsern terhadap perkembangan akuntansi untuk pesantren. Akan tetapi pada kenyataannya sebagian pesantren yang telah berkembang sedemikian rupa, kegiatan tidak hanya dari proses belajar mengajar akan tetapi pesantren juga sudah mengembankan lini kegiatan pada dunia bisnis. Menjawab tantangan dengan semakin berkembangnya kegiatan pesantren maka dituntut untuk menyajikan laporan keuangan sesuai standar akuntansi yang berlaku di Indonesia. Dengan tantangan tersebut penelitian ini ditulis untuk mengkaji literature Pedoman Akuntansi Pesantren (PAP) dan menyerderhanakan bahasa akuntansi yang ada dalam PAP menjadi lebih bisa diakomodir untuk kepentingan pesantren sebagai rujukan penyusunan laporan keuangan pesantren.

Pedoman Akuntansi Pesantren (PAP) disusun berdasarkan acuan SAK ETAP yaitu Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik serta menggunakan PSAK no 45 tentang organisasi nirlaba serta ISAK syariah.

Entitas pelaporan adalah suatu entitas berbadan hukum yang berbentuk yayasan. Ini berarti pedoman ini untuk dipakai pesantren yang sudah mempunyai badan hukum. Dan konsekuensinya pesantren yang sudah berbadan hukum dan berbentu yayasan yaitu bahwa asset, liabilititas dari pondok pesantren harus bisa dibedakan dan dipisahkan dengan asset dan liabilitas dari organisasi lain ataupun perseorangan.

Penyajian laporan keuangan harus mengikuti standar akuntansi yang berlaku waktu pelaporannya adalah laporan keuangan pesantren disajikan secara tahunan yaitu tahun hijriah atau tahun masehi.

A. AKUNTANSI ASET

Akuntansi yang digunakan dalam penyusunan laporan keuangan pesantren adalah akuntansi asset. Akuntansi asset yaitu pencatatan sumber daya yang dikuasai yayasan/pesantren sebagai akibat dari peristiwa/transaksi masa lalu dan mempunyai manfaat masa yang akan datang diperkirakan akan diperoleh dimasa yang akan datang. Asset dibedakan menjadi dua kelompok besar yaitu asset lancar dan asset tidak lancar. Asset lancar adalah :

- A. Asset lancar diperkirakan akan dimiliki atau dikuasai untuk digunakan atau dijual oleh yayasan dalam jangka waktu siklus operasi normal.
- B. Asset yang dimiliki untuk diperdagangkan.
- C. Asset dapat direalisasikan dalam jangka waktu 12 bulan setelah akhir periode pelaporan.
- D. Kas atau setara kas, kecuali dibatasi penggunaan dari pertukaran atau digunakan untuk menyelesaikan kewajiban dalam waktu 12 bulan atau sampai akhir periode akuntansi.
- E. Asset tidak lancar yaitu asset – asset yang tidak termasuk asset lancar.

Asset lancar bisa diklasifikasikan sebagai berikut :

1. Kas dan setara kas

Kas adalah mata uang kertas maupun logam baik rupiah maupun mata uang asing yang dapat digunakan sebagai pembayaran yang sah diwilayah hukum NKRI. Sedangkan setara kas adalah investasi yang berbentuk liquid atau yang mudah untuk dicairkan untuk menjadi kas kapan pun, investasi ini berjangka pendek, dan apabila dicairkan dalam bentuk kas dalam jumlah tertentu dan tidak menghadapi resiko perubahan nilai.

Pengukuran dan pengakuan kas dan setara kas diukur sesuai dengan nilai nominalnya dan diakui saat terjadinya. Kas dalam mata uang asing diakui saat diterimanya sesuai nilai nominal dan dijabarkan ke rupiah sesuai kurs pada tanggal transaksi. Kas pada akhir periode disesuaikan pada kurs tengah BI apabila ada selisih diakui sebagai keuntungan dan kerugian kurs. Kas dan setara kas dihentikan jika sudah digunakan sesuai nilai nominal, dan dihentikan pengakuannya ketika digunakan sebesar nilai nominalnya dan dirupiahkan sesuai kurs pada tanggal transaksi. Penyajian kas dan setara kas berada dalam pos asset lancar. Contoh jurnal kas dan setara kas :

Penerimaan

(Debit) Kas/Setara kas

(kredit) Pos yang terkait.

Pengeluaran

(Debit) Pos yang terkait

(kredit) Kas/Setara kas

2. Piutang Usaha

Piutang adalah hak tagih untuk memperoleh kas dan setara kas dari yayasan pondok pesantren kepada pihak lain. Piutang muncul akibat transaksi penjualan barang atau jasa dari pondok pesantren kepada pihak lain, dan yayasan pondok pesantren harus mengungkapkan dan menetapkan kebijakan pembentukan penyisihan piutang yang tidak tertagih, hapus piutang sebagai konsep *konservatisme dan skeptisme*

Piutang diakui saat terjadi transaksi penjualan barang atau jasa secara kredit. sebesar nilai jumlah yang ditagihkan. Piutang yang tidak tertagih atau penyisihan piutang diakui sebagai beban sebesar jumlah yang dibentuknya. Piutang usaha dihentikan pengakuannya pada saat dilunasi atau cara penyelesaian lainnya atau saat dihapus buku. Piutang usaha disajikan dalam kelompok aset lancar. Penyisihan piutang usaha disajikan sebagai pos lawan dari piutang usaha.

Ilustrasi jurnal adalah

Saat terjadinya

(Debit) Piutang Usaha

(Kredit) Pendapatan/Penjualan

Saat Penyisihan

(Debit) Beban Penyisihan

(Kredit) Akumulasi Penyisihan Piutang

Saat Pelunasan

(Debit) Kas dan setara kas

(Kredit) Piutang Usaha

Saat Penghapusan

(Debit) Akumulasi Penyisihan Piutang

(Kredit) Piutang Usaha

3. Persediaan

Persediaan adalah aset yang tersedia untuk dijual dalam kegiatan usaha biasa, dalam proses produksi untuk penjualan tersebut, dan dalam bentuk bahan atau perlengkapan untuk digunakan dalam proses produksi atau pemberian jasa. Persediaan diakui pada saat perolehan sebesar biaya perolehannya, penurunan nilai atas persediaan diakui sebagai kerugian sebesar selisih jumlah tercatat dan nilai realisasi neto, pemulihan atas penurunan nilai persediaan diakui sebagai keuntungan, dan persediaan dihentikan pengakuannya pada saat dijual atau digunakan. Persediaan disajikan dalam kelompok aset lancar.

4. Biaya dibayar dimuka

Biaya dibayar di muka adalah pembayaran biaya dimuka yang manfaatnya akan digunakan dalam periode yang akan datang. Biaya dibayar dimuka berfungsi antara lain untuk membiayai operasional yayasan pondok pesantren dan unit usahanya. Misalnya, biaya sewa yang dibayar dimuka. Biaya dibayar dimuka diakui pada saat dilakukan pengeluaran uang namun jasa/manfaat belum diterima, sebesar jumlah yang dibayarkan, biaya dibayar dimuka berkurang pada saat jasa/manfaat diterima atau habis masanya, dan pada akhir periode pelaporan, biaya dibayar dimuka diakui sebesar nilai yang setara dengan jasa/manfaat yang belum diakui pada periode berjalan. Biaya dibayar di muka disajikan dalam kelompok aset lancar. Ilustrasi jurnal biaya dibayar dimuka sebagai berikut:

Saat pengeluaran

(Debit) Biaya dibayar dimuka

(Kredit) kas atau setara kas

Saat akhir periode berjalan

(Debit) Beban sewa/Pos terkait

(Kredit) Biaya dibayar dimuka

5. Aset lancar lainnya

Aset lancar lainnya merupakan aset yang tidak dapat digolongkan kedalam pos –pos aset lancar yang ada dan tidak cukup material untuk menjadi aset lancar tersendiri. Aset lancar lain diakui pada saat diperoleh sebesar biaya perolehan. Aset lancar lainnya dihentikan jika sudah digunakan sebesar nilai perolehannya.

6. Aset tetap

Aset tetap adalah aset yang berwujud yang dimiliki dan dipergunakan untuk penyediaan jasa, disewakan kepada pihak lain dalam kegiatan usaha sehari – hari, atau digunakan dalam kegiatan administratif dalam jangka waktu lebih dari satu periode. Aset tetap dapat dikelompokkan sebagai berikut :

- a) Tanah
- b) Bangunan
- c) Kendaraan
- d) Komputer
- e) Mebeliar
- f) Lain – lainnya

Biaya perolehan aset tetap dikelompokkan atas :

- A. Harga perolehannya serta pajak yang tidak boleh dikreditkan setelah dikurang potongan pembelian dan potongan lainnya.
- B. Biaya – biaya yang digunakan untuk mobilisasi atau demobilisasi aset
- C. Estimasi awal biaya pembongkaran dan pemindahan aset tetap dan restorasi lokasi aset, jika yayasan pondok pesantren memiliki kewajiban untuk melaksanakan hal tersebut.

Biaya perolehan aset yang didonasikan pihak lain diukur sesuai nilai wajarnya dan biaya perawatan aset diakui sebagai beban pada periode berjalan kecuali ada ketentuan lain untuk dikapitalisasi aset.

Penyusutan aset selain tanah ditetapkan garis lurus sesuai umur manfaat aset yayasan pondok pesantren dimana aset tersebut memberi manfaat ekonomi pada yayasan pondok pesantren tersebut. Aset tetap tanah tidak disusutkan. Aset tetap diukur sesuai harga perolehannya, penyusutan atas aset diakui sebagai beban tahun/periode berjalan. Penurunan nilai atas aset tetap diakui sebagai kerugian, dan pemulihan atas penurunan nilai aset tetap diakui sebagai keuntungan, dan Aset tetap dihentikan pengakuannya pada saat dijual atau cara pelepasan lain, atau dihapuskan. Aset tetap disajikan dalam kelompok aset tidak lancar. Ilustrasi jurnal aset tetap yaitu sebagai berikut :

- Pembelian

(Debit) Aset Tetap

(Kredit) Kas atau setara kas/Utang

- Melalui Pembangunan

(Debit) Aset tetap dalam pembangunan

(Kredit) Kas atau setara kas/Utang

(Debit) Aset Tetap

(Kredit) Aset tetap dalam pembangunan

- Melalui Hibah

(Debit) Aset Tetap

(Kredit) Pendapatan Hibah

- Penyusutan

(Debit) Beban Penyusutan

(Kredit) Akumulasi Penyusutan

- Saat Penjualan Aset (Keuntungan)

(Debit) Kas atau setara kas/piutang

(Debit) Akumulasi Penyusutan

(Kredit) Aset Tetap

(Kredit) Keuntungan

- Saat Penjualan Aset (Kerugian)

(Debit) Kas atau setara kas/piutang

(Debit) Akumulasi Penyusutan

(Debit) Kerugian

(Kredit) Aset Tetap

- Penghapusan aset tetap

(Debit) Akumulasi Aset tetap

(Kredit) Aset tetap

7. Aset tidak berwujud

Aset tidak berwujud adalah aset nonmoneter yang dapat diidentifikasi tanpa wujud fisik, Aset tidak berwujud muncul melalui perolehan dari pihak di luar yayasan pondok pesantren, misalnya aplikasi komputer yang dibeli dari pihak lain. Aset tidak berwujud diakui sebesar nilai

perolehannya yaitu harga beli ditambah biaya – biaya yang terkait dengan perolehannya. Aset tidak berwujud diamortisasi dengan metode garis lurus sesuai umur manfaat ekonomisnya. Aset tidak berwujud dihentikan pengakuannya ketika dilepas kepada pihak lain atau tidak digunakan lagi. Aset ini disajikan di pos aset tidak lancar. Ilustrasi jurnal aset tidak berwujud :

- Saat Perolehan

(Debit) Aset Tidak Berwujud

(Kredit) Kas atau setara kas

- Saat amortisasi

(Debit) Beban Amortisasi

(Kredit) Akumulasi Amortisasi

- Saat Penghentian

(Debit) Akumulasi Amortisasi

(Kredit) Aset Tidak Berwujud

8. Aset tidak lancar lainnya

Aset tidak lancar lain adalah aset-aset tidak lancar yang tidak dapat secara layak digolongkan dalam kelompok pos aset tidak lancar yang ada dan tidak material untuk disajikan dalam pos tersendiri, Batasan materialitas penyajian adalah 5% dari total nilai aset. Aset tidak lancar lain diakui pada saat diperoleh sebesar biaya perolehan, dan Aset tidak lancar lain dihentikan pengakuannya pada saat digunakan dan disajikan pada pos aset tidak lancar.

B. AKUNTANSI LIABILITAS

Pedoman akuntansi pesantren juga menggunakan akuntansi liabilities untuk pos pasiva yaitu kewajiban masa kini yang timbul akan transaksi atau peristiwa masa lalu dan penyelesaiannya diperkirakan mengakibatkan arus keluar sumber daya ekonomi yayasan pondok pesantren yang memberi manfaat ekonomi. Kewajiban dapat dipaksakan menurut hukum (*legal obligation*) sebagai konsekuensi dari kontrak yang mengikat atau peraturan perundang-undangan. Kewajiban juga dapat timbul dari praktik usaha yang lazim, kebiasaan, dan keinginan untuk memelihara hubungan yang baik atau bertindak dengan cara yang adil (*constructive obligation*). Liabilitas pondok pesantren seperti halnya organisasi yang lain dikelompokkan kedalam dua kelompok besar yaitu liabilitas jangka pendek dan jangka panjang. Liabilitas jangka pendek adalah :

- a) Liabilitas akan selesai dalam waktu siklus normal satu periode

- b) Liabilitas tujuan diperdagangkan
- c) Jatuh tempo dalam waktu 12 bulan
- d) Pondok pesantren tidak ada resiko syarat sekurang kurangnya dalam masa waktu penyelesaian atau dalam waktu ajtuh tempo.

Liabilitas jangka panjang adalah liabilitas yang tidak termasuk dalam liabilitas jangka pendek atau dengan kata lain jatuh tempo lebih dari 12 bulan setelah tanggal periode laporan

Pendapatan diterima dimuka adalah Pendapatan diterima dimuka adalah penerimaan yang belum dapat diakui sebagai pendapatan. Pendapatan diterima dimuka adalah penerimaan kas dan setara kas oleh unit usaha yayasan pondok pesantren atas penjualan barang dan penyediaan jasa yang belum dilakukan. Misalnya sewa diterima dimuka. Pendapatan diterima dimuka diakui pada saat penerimaan sebesar jumlah yang diterima. Pada akhir tahun buku, dilakukan penyesuaian atas pendapatan diterima dimuka yang sudah dapat diakui sebagai pendapatan. Pendapatan diterima dimuka disajikan dalam liabilitas jangka pendek, jika penjualan barang dan jasa akan diberikan dalam jangka waktu dua belas bulan setelah akhir periode pelaporan, dan Pendapatan diterima dimuka disajikan dalam liabilitas jangka panjang, jika penjualan barang dan jasa akan diberikan dalam jangka waktu lebih dari dua belas bulan setelah akhir periode pelaporan. Ilustrasi jurnal liabilitas jangka panjang dan jangka pendek :

- Utang jangka pendek
Terjadinya
(Debit) kas atau setara kas
(Kredit) Utang Jangka Pendek
- Penghentian
(Debit) Utang Jk pendek
(Kredit) Kas atau setara kas
- Pendapatan diterima dimuka
(Debit) Kas atau setara kas
(Kredit) Pendapatan diterima dimuka
- Reklasifikasi
(Debit) Pendapatan diterima dimuka (jk panjang)
(Kredit) Pendapatan diterima dimuka (jk pendek)

- Akhir periode
(Debit) Pendapatan diterima dimuka
(Kredit) Pos terkait
- Utang jangka panjang
(Debit) Kas atau setara kas
(Kredit) Utang jangka panjang
- Reklasifikasi
(Debit) Utang jangka panjang
(Kredit) Utang jangka pendek
- Penghapusan
(Debit) Utang jangka panjang
(Kredit) Kas dan setara kas

C. ASET NETTO

Sebagai suatu entitas pelaporan, aset dan liabilitas dari pondok pesantren harus dapat dibedakan dengan aset dan liabilitas dari entitas lainnya baik organisasi maupun perseorangan. Aset neto adalah hak residual atas aset yayasan pondok pesantren setelah dikurangi semua liabilitas. Aset neto dikelompokkan berdasarkan ada atau tidaknya pembatasan oleh pihak yang memberikan sumber daya terhadap penggunaan sumber daya tersebut, atau adanya pembatasan penggunaan yang diatur dalam ketentuan syariah maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pihak yang memberi sumber daya kepada yayasan pondok pesantren dapat memberikan pembatasan penggunaan sumber daya tersebut. Dana yang diterima tersebut menjadi bersifat terikat penggunaannya. Dana yang diterima yayasan pondok pesantren dapat bersifat terikat sebagaimana yang diatur dalam ketentuan syariah. Pembatasan aset neto dapat bersifat temporer ketika pembatasan bersifat sementara sampai dengan jangka waktu tertentu atau tercapainya tujuan, atau pembatasan yang bersifat permanen ketika tidak ada batasan waktu atau pencapaian tujuan.

1) Aset netto tidak terikat

Adalah aset netto yang penggunaannya tidak dibatasi untuk tujuan tertentu oleh pemberi dana maupun atau hasil dari operasional pondok pesantren. Aset netto pondok pesantren merupakan akumulasi pendapatan dengan ditandingkan beban tidak terikat yang terjadi selama satu periode berjalan pada pondok pesantren. Pendapatan tidak terikat antara lain :

- a) Kontribusi santri
- b) Hibah pendiri yayasan
- c) Bantuan pemerintah, korporasi yang tidak ada pembatasan penggunaan
- d) Aset netto terikat yang berakhir pengikatannya
- e) Penadapatan lain yang tidak terikat.

Pengakuan dan pengukuran aset netto tidak terikat yaitu pada akhir tahun buku pendapatan tidak terikat dan beban tidak terikat ditutup (*closing entries*) ke aset netto tidak terikat. Dan aset netto tidak terikat disajikan pada pos aset netto.

2) Aset netto terikat

Aset netto terikat adalah aset netto berupa sumber daya yang penggunaannya dan/atau waktunya dibatasi untuk tujuan tertentu dan/atau jangka waktu tertentu oleh pemberi dana. Aset netto terikat merupakan akumulasi pendapatan dan beban terikat dari yayasan pondok pesantren. Aset netto terikat dibagi menjadi terikat temporer dan terikat permanen, dan pembatasan penggunaan dana oleh pemberi dana, ketentuan syariah, dan peraturan perundang – undangan, agar sumber daya terikat secara permanen. Yayasan pondok pesantren diizinkan untuk menggunakan sebagian atau semua penghasilan atau manfaat ekonomi lainnya yang berasal dari sumber daya tersebut. Pembatasan temporer adalah pembatasan penggunaan sumber daya oleh pemberi dana yang menetapkan agar sumber daya tersebut dipertahankan sampai dengan periode tertentu atau sampai dengan terpenuhinya keadaan tertentu. Pembatasan temporer dapat ditunjukkan melalui pembatasan waktu, pembatasan penggunaan, atau pembatasan keduanya atas aset atau dana yang diterima oleh yayasan pondok pesantren.

Pengakuan dan pengukuran aset netto terikat yaitu pada akhir tahun buku pendapatan terikat dan beban terikat ditutup (*closing entries*) ke aset netto terikat. Dan aset netto terikat disajikan pada pos aset netto. Aset netto terikat direklasifikasi ke aset netto tidak terikat pada saat terpenuhinya program atau berakhirnya waktu pembatasan. Penyajian dalam laporan keuangan diklasifikasikan kedalam aset netto terikat temporer dan terikat permanen.

Kesimpulan dan Saran

Penelitian ini membahas akan pos–pos akuntansi yang ada dalam Pedoman Akuntansi (PAP) yang dikeluarkan IAI dan BI merujuk pada PSAK No 45 tentang organisasi nirlaba. Studi litertur dalam penyajian penelitian ini dengan menggunakan bahasa yang sederhana dalam membahas literatu PAP tanpa mengurangi kandungan isi dari PAP ini. Adapun adalah penelitian

ini dibahas tentang pos yang ada di neraca maupun laporan aktivitas serta laporan arus kas, sehingga dapat dijelaskan apa yang dinamakan Catatan Atas Laporan keuangan. Penelitian ini mengupas pos – pos akuntansi agar bisa bermanfaat bagi perkembangan akuntansi pondok pesantren. Dan saran kedepan lebih banyak lagi kajian terhadap akuntansi yang bergerak dibidang keagamaan bukan hanya pesantren tetapi juga akuntansi masjid, akuntansi organisasi yang serius dalam urusan keagamaan untuk meningkatkan akuntabilitas lembaga keagamaan. Kajian ini diperlukan untuk menjadi bahan masukan dewan akuntansi untuk mengeluarkan standar baku terhadap akuntansi pesantren.

DAFTAR PUSTAKA

Halim, Abdul dan Syam Kusufi. 2012. Teori, Konsep, dan Aplikasi Akuntansi Sektor Publik: Dari Anggaran Hingga Laporan Keuangan Dari Pemerintahan Hingga Tempat Ibadah. Jakarta : Salemba Empat.

Ikatan Akuntan Indonesia. 2017. Pedoman Akuntansi Pesantren. Jakarta.

Ikatan Akuntan Indonesia. 2009. Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan. Jakarta : Salemba Empat.

Kieso, Donald E., Kimmel, dan Jerry J Weygant. 2010. Accounting Principle. 9th Edition. New York : John Wiley & Sons, Inc.

Kieso, Donald E., dan Jerry J. Weygant. 2011. Intermediate Accounting. IFRS Edition. New York: John Wiley & Sons, Inc.

<http://infodanpengertian.blogspot.com/2016/01/pengertian-penelitian-kualitatif.html>

<http://margiasihwibowo.blogspot.com/2015/11/telaah-literatur-penelitian.html>

<http://dapurilmiah.blogspot.com/2014/06/penelitian-literatur.html>